



## **MEDIA HYPE DAN AMPLIFIKASI TERORISME**

**Andry Haryanto Siregar**

Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

### **Abstrak**

Tulisan ini akan membagi dua pembahasan mengenai relasi media dan terorisme serta amplifikasi pemberitaan terorisme melalui cross communication platform. Artinya, pemberitaan tidak lagi berdampak satu arah namun sudah dua arah dan kian interaktif. Perkembangan teknologi informasi turut merubah peta jurnalisme dan kebiasaan baru di ranah komunikasi. Medium internet yang dimoderasi oleh perangkat keras dan lunak menyumbang bentuk baru pemberitaan juga distribusi melalui media sosial beragam platform yang kian partisipatif, seperti pemakaian microblogging, aplikasi percakapan, dan juga beragam media sosial. Berita dihadirkan bukan lagi karena kebutuhan khalayak, namun apa yang diinginkan khalayak itu sendiri. Akibatnya, pemberitaan lepas dari persoalan inti terorisme itu.

**Kata Kunci:** media massa, media sosial, terorisme, teroris.

## PENDAHULUAN

Laquer (2003) melemparkan argumen mengejutkan mengenai relasi terorisme dan media. Dia menyoroti peran media saat ini dalam pemberitaan tragedi terorisme, bahkan dia menyebutkan bahwa media merupakan teman terbaik teroris karena publikasi bagi kelompok teror adalah segalanya dalam menyampaikan pesannya. Tanpa media, teroris sama dengan bekerja seorang diri. Di sisi lain, aksi teroris menjadi objek pemberitaan media hingga beberapa media berlomba menyiarkan aksi terorisme baik yang telah terjadi maupun tengah berlangsung.

Tulisan ini membagi dua pembahasan, yaitu mengenai relasi media dan terorisme serta amplifikasi pemberitaan terorisme melalui *cross communication flatform*. Artinya, pemberitaan tidak lagi disajikan satu arah namun kian interaktif. Hal itulah yang mendasari perbedaan media sebelumnya seperti koran, televisi, cetak, serta radio, dengan medium internet. Berita tidak berhenti di pembaca, namun kemudian diproduksi kembali melalui *platform* media sosial untuk kepentingan tertentu (dalam hal ini terorisme).

*Perkembangan teknologi informasi turut merubah peta jurnalisme dan kebiasaan baru di ranah komunikasi. Medium internet yang dimoderasi oleh perangkat keras dan lunak menyumbang bentuk baru pemberitaan juga distribusi melalui media sosial beragam platform yang kian partisipatif, seperti pemakaian microblogging, aplikasi percakapan, dan juga beragam media sosial (Tapsell, 2019).*

Di sisi lain, sejak awal 1970-an para sarjana telah meneliti peran media dalam kaitannya dengan terorisme. Dalam banyak hal, sub-spesialisasi di bidang studi terorisme biasanya berlabuh dalam sejumlah disiplin akademis termasuk studi komunikasi, hukum, ilmu politik, dan sosiologi (Ross,

2007). Namun kala itu belum ada karya ilmiah yang berdiri sendiri membahas mengenai relasi antara media dan terorisme, tapi baru artikel per *peer review* di bab buku ilmiah.

Terorisme tidak sekedar dimaknai sebagai sebuah gerakan destruktif, mengingat aksi teror sarat dengan kepentingan politik dan gejolak emosional. Sehingga kata teror, teroris, dan terorisme bisa berartikulasi dalam berbagai konteks. Contohnya adalah invasi Amerika Serikat ke Vietnam, Irak, dan Afganistan yang disebut Noam Chomsky sebagai aksi terorisme yang dilakukan oleh negara atau dia sebut sebagai *state terrorism*. Lain halnya dengan pandangan terorisme menurut Amerika Serikat. Bagi negara adidaya ini, siapapun individu atau kelompok yang dianggap membahayakan kepentingan Amerika Serikat, seperti Al Qaida dan Taliban, maka mereka adalah teroris dan musuh utama militer Amerika. Pada akhirnya kata teroris merujuk pada kelompok atau organisasi pejuang kemerdekaan atau pejuang revolusioner. Gerakan kelompok revolusioner ini pada umumnya adalah aksi bom bunuh diri, penculikan, pembunuhan, bahkan pembajakan pesawat. Dengan demikian, aksi-aksi tersebut tidak sekedar dilihat sebagai aksi kekerasan, namun sebagai bentuk komunikasi politik yang berujung pada penggunaan kekerasan bahkan kejahatan (Junaedi, 2010).

Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam Konvensi pada 1973 memberikan batasan pada kata terorisme, yaitu kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud menciptakan teror terhadap orang-orang tertentu atau masyarakat luas. Secara eksplisit Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau *US Department of Defense* mendefinisikan terorisme sebagai perbuatan yang mengandung ancaman dengan kekerasan kepada individu untuk memaksa atau mengintimidasi pemerintah atau

masyarakat dengan tujuan politik, agama atau ideologi. Sementara Tentara Nasional Indonesia dalam Buku Petunjuk Teknik (Bujuknik) Sementara TNI- AD, berdasarkan Bujuknik mendefinisikan terorisme sebagai cara berfikir dan bertindak dengan menggunakan teros sebagai suatu cara untuk mencapai tujuan tertentu. Berbeda dengan Departemen pertahanan, dalam definisi TNI AD ini tidak disebutkan motif di balik aksi teror, apakah itu politik, agama, atau ideologi tertentu.

Kriminolog Universitas Indonesia Muhammad Mustofa dalam (Adisaputra, 2008) mendefinisikan terorisme sebagai tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditujukan kepada sasaran secara acak (tidak ada hubungan langsung dengan pelaku) yang berakibat pada kerusakan, kematian, ketakutan, ketidakpastian dan keputusan massal.

Menurut McNair (1995) aksi terorisme merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan di luar prosedur konstitusional. Publisitas dengan memanfaatkan media merupakan upaya kelompok teror untuk mempengaruhi psikologis khalayak yang menyaksikannya melalui media guna mendapatkan simpati publik dan serta menciptakan ketakutan dan kekacauan.

Seiring perkembangan zaman, kemajuan dan inovasi teknologi komunikasi turut mempengaruhi kajian ilmiah mengenai terorisme. Perkembangain media yang tidak lagi satu arah dan kian interaktif membuat kelompok teror memanfaatkan medium dalam mengamplifikasi aksi terornya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literature atau kepustakaan. Penulis melakukan penelaahan dari berbagai sumber tertulis seperti penelitian ilmiah dengan tema sejenis yang melingkupi bidang komunikasi, sosiologi, dan kriminologi.

Selain itu, penulis melakukan penelusuran jurnal-jurnal ilmiah nasional dan internasional, serta buku-buku.

Studi literatur digunakan sebagai pijakan peneliti untuk mencari dasar pijakan dalam membangun dasar teori, kerangka berfikir, serta hipotesa penelitian. Sehingga seorang peneliti dapat mengorganisasikan varian pustaka dalam bidang penelitiannya sehingga memiliki kedalaman dalam masalah yang diteliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Salah satu peristiwa teroris paling menonjol yang diliput oleh media adalah penculikan atlet Israel ketika Olimpiade 1972 yang diselenggarakan di Munich. Anggota *Black September* menyadari bahwa media arus utama dengan cakupan siaran dunia akan hadir di acara tersebut. Kelompok teror ini lalu memutuskan untuk menunggangi momen internasional itu untuk kepentingan aksi teror mereka. Mereka memerlukan publikasi luas agar aksi yang dipersiapkan itu tersebar luas dan membawa pesan yang ingin disampaikan. Adapula asumsi yang lahir terkait serangan teroris 9 September atau 9/11 yang terkesan diatur waktunya sehingga kamera televisi akan menangkap pesawat kedua yang menabrak menara *World Trade Center* (WTC). Alhasil, seluruh mata dunia tertuju pada serangkaian aksi teroris tersebut dan menebar segala dampak ketakutan.

Di tempat lain dengan periode waktu berbeda, serangkaian serangan teror terjadi di Kota Mumbai pada 26 November 2008. Sepuluh orang yang merupakan bagian dari organisasi ekstrimis *e-Taiba* berada di balik dalang serangan penembakan dan pemboman di titik-titik target teror. Aksi terorisme itu berlangsung hingga 29 November 2008, tercatat 74 orang tewas -termasuk 9 penyerang, dan lebih dari 300 orang

luka-luka. Tragedi tersebut membuka perdebatan sengit bukan saja di kalangan politikus terkait lemahnya sistem keamanan dan pertahanan negara yang rentan terhadap serangan teror, namun juga di kalangan praktisi media.

Bagaimana tidak, selama 60 jam aksi teroris disiarkan langsung baik di televisi lokal India maupun internasional. Narasi yang dibangun dalam pemberitaannya adalah mencekam, ketakutan, frustrasi, dan kepanikan. Ruang-ruang keluarga melalui televisi dipenuhi 'teror' melalui pemberitaan yang memenuhi seluruh kanal siaran media, baik itu televisi maupun radio, juga media cetak keesokan harinya. Apa yang terjadi itu dapat dikategorikan sebagai 'teror yang dinarasikan', yang dalam arti penting bahwa berita yang dihasilkan tersebut merupakan sebuah konstruksi media (Udupa, 2009), yang merupakan serangkaian praktik media yang disertai, dibantu, dan seringkali dihasilkan dari sejumlah faktor eksternal yang bersama-sama menciptakan narasi ketakutan. Media bersaing untuk mendapatkan perhatian pembaca atau penonton dengan menjadi yang pertama atau dengan ironisnya, dalam proses itu sendiri, saling mengacu pada apa yang dianggap sebagai berita dan bagaimana seharusnya diperlakukan.

Aksi-aksi terorisme kemudian menjadi fakta yang mengisi ruang dan waktu media massa arus utama. Reformasi membawa angin segar sosial-politik Tanah Air, terutama arus informasi yang semula dibatasi rezim Orde Baru, kini terbuka seluas-luasnya. (Sukarno, 2011).

Kendati apa yang tersaji di media merupakan realitas sosial, namun hal itu berasal dari formulasi kerja redaksi melalui penyuntingan yang menghadirkan realitas dengan wajah yang lain dan sarat kepentingan, konflik, dan fakta yang beragam melalui (Mubarok, 2010).

### **Kompleksitas Media**

Perbedaan tindak kekerasan lain dengan terorisme adalah karena aksi teror tersebut dianggap memiliki nilai berita yang lebih kompleks dan memiliki potensi menjadi *big news* karena melibatkan unsur konflik dan konfrontasi, sehingga nilai berita yang terkandung dalam pemberitaan terorisme dianggap penting (Sukarno, 2011).

Jika liputan media adalah cermin realitas murni, jumlah perhatian terhadap suatu masalah secara alami akan mengikuti peristiwa dan perkembangan dunia nyata seputar masalah tersebut. Perhatian media, bagaimanapun, juga dipandu oleh kebutuhan media untuk 'menceritakan sebuah cerita yang baik' (Wolfsfeld, 2014).

Di sisi kontraterorisme *war on terrorism* atau perang melawan terorisme, media menjadi corong kepentingan pemerintah guna menangkal serangan ideologi terorisme itu sendiri. Alhasil, wacana pengetahuan mengenai apa itu terorisme dibentuk sesuai dengan kepentingan pemerintah. Narasi ini mulai berkembang usai serangan 911 melanda Amerika Serikat dan menekankan kepada ketakutan yang akan menimpa umat manusia di massa mendatang yang tidak pasti (Altheide, 2007). Seperti halnya ketika Amerika Serikat membentuk pandangan tentang masyarakat Asia sebagai "*Asians' who 'did not value life'*" ketika Amerika menginvasi Vietnam dalam perang melawan komunisme. *Lalu, bagaimana di Indonesia?*

Peristiwa penyergapan gembong teroris di Temanggung, Jawa Tengah, Agustus 2009, dan disiarkan langsung oleh banyak media menjadi perbincangan di kalangan praktisi media dan akademisi. Judul yang dipasang di layar kaca adalah "Detik-Detik Penyerbuan Noordin" meski belum

dipastikan sosok di dalam rumah yang dikepung tersebut Noordin M Top gembong teroris atau bukan.

Layaknya film perang, berita tersebut menyajikan siaran langsung pengepungan, penembakan, pemboman rumah yang dihuni target operasi aparat. *Tv One* menyiarkan siaran langsung penyergapan nyars 18 jam, terhitung 7 Agustus malam hingga selesai keesokan harinya pada 8 Agustus sekitar pukul 10.00-11.00 WIB. Suasana mencekam disampaikan reporter lapangan melalui siaran langsungnya tersebut. Bahkan potongan adegan yang dianggap dramatis disiarkan berulang-ulang oleh stasiun televisi tersebut. Tidak lupa suara latar dramatis yang menggambarkan ketegangan dan aksi heroic aparat di lapangan (Suwarna, 2009).

Demikian pula dengan peristiwa teror Jakarta yang terjadi 14 Januari 2016. Stasiun tivi, portal berita *online*, radio semua berlomba menampilkan peristiwa penyerangan tersebut. Sejumlah orang meledakan pos polisi di tengah kepadatan aktivitas masyarakat. Baku tembak terdengar di lokasi ledakan bom Pos Polisi Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. Stasiun *Tv One* mengabarkan peristiwa tersebut dengan cepat. Namun sayang tidak akurat. Stasiun tivi tersebut mengabarkan terdapat ledakan susulan di beberapa tempat di Jakarta, yaitu Slipi, Kuningan, dan Cikini. Informasi cepat tersebut sekelebat disiarkan langsung kendati faktanya tidak terdapat aksi bom susulan di beberapa lokasi yang disebutkan itu.

Stasiun Metro TV pun turut memberitakan spekulasi bom susulan di beberapa tempat di Jakarta tanpa melakukan verifikasi terlebih dulu. Padahal konfirmasi dan verifikasi mutlak dilakukan sebelum informasi disiarkan. Praktik-praktik seperti itu jelas jauh dari etika jurnalistik (Remotivi, 2016).

Metro Tv juga menggunakan momentum teror sebagai ajang promosi

Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang tak lain pemilik Stasiun Metro tv sebanyak dua kali sepanjang peristiwa tersebut menjadi *headline*. Tentunya pernyataan Surya Paloh yang mengutuk serangan teror tidak relevan dengan kebutuhan publik saat itu mengenai rasa aman dari peristiwa teror yang terjadi di Jalan Thamrin.

Persaingan ketat antarmedia berdampak jurnalis memilih menanggapi berita media lain dan bersandar pada preferensi khalayak (Atteveldt, 2018). Berita dihadirkan bukan lagi karena kebutuhan khalayak, namun apa yang diinginkan khalayak itu sendiri. Akibatnya, pemberitaan lepas dari persoalan inti terorisme itu. Perubahan lanskap media menyebabkan pergeseran dari *trusteemodel* (Schudson, 2011) di mana penilaian profesional oleh jurnalis menentukan pilihan pemilihan berita, menuju 'model pasar', yang menyiratkan bahwa jurnalis memenuhi preferensi audiens. Seperti yang dikatakan oleh Brants dan Van Praag (2014), bahwa asumsi dan keinginan publik menjadi lebih menentukan apa yang dipilih dan disediakan oleh media. Ini terutama berlaku untuk situs berita online. Beberapa penelitian menemukan bahwa *audiencemetrics online* mempengaruhi pilihan berita pemilihan jurnalis. Kepentingan penonton, bagaimanapun, ditentukan sebagian oleh media itu sendiri. Dengan memberitakan suatu masalah, arti penting publik dari masalah tersebut meningkat, sehingga lebih menarik bagi jurnalis untuk menindaklanjuti berita tersebut, hingga rasa ingin tahu publik terpuaskan dan minat berkurang (Djerf-Pierre, 2014).

Ross (2007) membagi enam kendala dasar yang kerap dihadapi media dalam meliput isu terorisme. Sehingga kemungkinan besar pelaporan peristiwa yang lebih dipilih setiap redaksi dalam peliputan terorisme dan bukan mendalami atau mengkhususkan pada pelaporan mendalam isu terorisme.

*Pertama*, jurnalis yang menghadapi ancaman kekerasan seperti pemerasan dan intimidasi sat berupaya mendapatkan akses untuk meliput kelompok teroris. Keamanan menjadi prioritas karena beberapa wartawan telah diculik dan dibunuh dalam upaya mereka untuk berbicara dengan teroris (Griset & Mahan, 2003). Misalnya, Daniel Pearl dari Wall Street Journal, saat bekerja di Lahore, Pakistan, pada 2002, menerima tip itu seorang petinggi al-Qaidah bersedia untuk berbicara dengannya. Sayangnya, ini hanyalah tipu muslihat dengan tujuan membunuhnya.

*Kedua*, diskresi redaksi. Artinya, setiap redaksi memiliki kebijaksanaan masing-masing tentang sebuah nilai berita. Tidak semua yang ditulis atau direkam kamera dapat dipublikasikan. Seperti disinggung sebelumnya, redaksi lebih memilih tulisan peristiwa daripada reportase mendalam mengenai terorisme.

*Ketiga*, redaksi tidak memiliki jurnalis atau reporter yang khusus membidangi isu terorisme. Hal ini menjadikan keterkendalaan jurnalis terhadap akses sumbernya. Hanya sedikit organisasi berita yang memiliki reporter yang mengkhususkan diri dalam meliput terorisme. Kadang-kadang, wartawan - seperti Josh Myers dari Los Angeles Times - mengkhususkan diri dalam meliput berita tentang terorisme. Selain itu, organisasi berita mungkin secara berkala mengandalkan pakar seperti Peter Bergen, yang secara teratur muncul di CNN.

*Keempat*, informasi yang keliru dan salah yang diberikan kepada wartwan oleh pihak berwenang. Sehingga jurnalis hanya bergantung pada data-data pemerintah dengan berbagai macam pertimbangan, salah satunya penegak hukum yang memiliki akses dan bukti mengenai terorisme.

*Kelima*, media dianggap menghambat upaya kontraterorisme dengan berita-beritanya. Misalnya saja

tragedi Mumbai dimana televisi menyiarkan secara langsung bahkan detik-detik penyanderaan kelompok teroris. Akibatnya, teroris dapat mengetahui taktik strategi aparat keamanan yang berupaya melumpuhkan kelompok teroris. Dan *keenam*, sensasionalitas. Hal ini didasari persaingan antar lembaga penyiaran untuk menjadi yang pertama menyiarkan aksi teroris di layar kaca. Untuk hal ini sudah disinggung di peristiwa Bom Sarinah di mana dua stasiun televisi berita mengabarkan peristiwa tersebut dengan mengesampingkan disiplin verifikasi.

Aksi teror baik itu skala kecil atau besar dapat memberikan dampak pada peliputan berita media massa. Oleh sebab itu pula teroris mendapat kebutuhannya akan publisitas aksinya tersebut. Akibatnya, teroris mendapatkan kebutuhan utamanya yaitu publisitas besar dan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan aksi mereka kepada negara atau kelompok yang disasar. Terorisme dirancang dan ditujukan kepada orang-orang yang menonton dan membaca aksinya, bukan kepada korban serangan teror itu sendiri (Sarundajang, 2017).

Makalah ini pada dasarnya bermula dari pengalaman dilematis penulis mengenai peliputan terorisme oleh media massa. Di satu sisi media berlomba memberitakan ancaman tersebut, namun di sisi lain media juga mejadi 'teror' itu sendiri yang menyusup ke tengah masyarakat tanpa disadari. Seperti yang pernah dibahas di kelas perkuliahan *Teror, Terorisme, dan Teroris*, media diibaratkan 'anak manis' yang menjadi perebutan keduabelah pihak. Di pihak pemerintah media diperlukan sebagai agen kontraterorisme, di sisi lain teroris menggunakan segala cara agar media mau meliput aksi mereka yang tanpa disadari bukan saja aksi yang menjadi tujuan pelaku teror, tapi pesan

yang tersebar yang menjadi tujuan utama teroris dan terorisme itu sendiri.

Gugatan terhadap keberadaan media massa dalam aktivitas menentang terorisme kemudian muncul. Satu tuduhan menyebut media massa dan teroris memiliki kepentingan yang sama. Pada tingkat ini, teroris menyusun dan memanfaatkan strategi media mereka dan di lain pihak, media menempatkan kepentingannya pada aktivitas kelompok teroris. Dalam relasi yang demikian terorisme kemudian tak boleh sekadar dipandang sebagai bentuk kekerasan belaka, namun wujud dari kombinasi antara propaganda dan kekerasan. (Graaf, 1982; dalam Prajarto, 2004).

Giessmann (2002) menjelaskan relasi antara media dan terorisme. Bagi kelompok teror, media merupakan panggung agar masyarakat terpengaruh propaganda aksi mereka. Selanjutnya, media akan memilah setiap detil dari foto, video, atau teks dari peristiwa teror yang terjadi sesuai dengan kebutuhan media masing-masing. Teroris memahami bagaimana setiap media berlomba agar peristiwa teror yang dilakukannya menjadi *leading newspaper* di antara media itu sendiri.

#### *Teroris 'Ambil Alih' Media*

Perkembangan teknologi komunikasi juga memicu teroris untuk meningkatkan kemampuan propagandanya, yaitu tidak hanya bergantung pada media-media satu arah seperti koran, majalan, radio, dan televisi, namun sudah mulai merambah media sosial. Saat ini kita memasuki era di mana komunikasi elektronik, internet atau jaringan menjadi semakin penting. Media baru dengan sifat interaktivitasnya, memudahkan pelaku teror untuk menyebarkan para pelaku teror semakin mudah untuk menyebarkan gagasannya menggunakan *platform* media internet. Misalnya saja *platform* video *youtube* semakin memudahkan kelompok teroris dalam

usahanya membingkai pemberitaan yang sesuai dengan tujuan aksi teror mereka tanpa sensor redaksi seperti yang dilakukan media arus utama.

Kehadiran media sosial membuat media arus utama mau tidak mau beradaptasi. Bila adaptasi dengan teknologi komunikasi mutakhir tersebut gagal dilakukan, media akan mengalami kemerosoton bahkan gulung tikar. Beberapa media di Amerika Serikat misalnya *The Rocky Mountains* dan *The Seattle Post Inttelegence* terpaksa gulung tikar karena kegagalannya dalam berdaptasi dengan perkembangan teknologi komunikasi baru.

Kehadiran media sosial bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi media sosial menjadi penyebar informasi suatu kejadian, namun di sisi lain turut mengamplifikasi aksi kelompok teror itu sendiri dalam menyebarkan narasi ketakutan, dengan skala yang jauh lebih cepat dan luas. Ketergantungan teroris dengan media ini pernah diungkapkan Ayman Al-Zawahiri pimpinan Al-Qaeda, bahwa media menjadi instrumen perang melawan Barat dan sekutunya. Di samping untuk merebut simpati umat Islam (Dana M. Janbek and Philip M. Seib, 2010).

David C Roporport (2013) memberikan istilah 'gelombang' atau 'wave' dalam aktivitas terorisme. Roporport mengistilahkannya sebagai siklus aktivitas dalam periode waktu tertentu dengan fase ekspansi dan kontraksi. Aktivitas yang terjadi di banyak negara tersebut terjadi di banyak negara didorong oleh energi utama yang sama yang membentuk hubungan kelompok yang berpartisipasi. Seperti namanya, energi yang berbeda mendorong setiap gelombang. Nama gelombang mencerminkan ciri khusus yang dominan.

Roporpot membagi teror modern menjadi empat gelombang, yaitu dimulai di Rusia pada tahun 1880-an di Eropa Barat, Balkan, dan Asia. Kaum

anarkis memulai aktivitas tersebut, dan strategi utama mereka adalah kampanye pembunuhan terhadap pejabat terkemuka, dan diadopsi oleh hampir semua kelompok kontemporer, bahkan mereka yang memiliki tujuan nasionalis di Balkan dan India. Sergey Nechayev adalah seorang revolusioner di satu sisi dan di sisi lain dicap sebagai dlang teror di Rusia atau Eropa Barat kala itu. *Gelombang Anarkis* ini berakhir pada 1920-an dan berlanjut dengan gelombang kedua, yaitu *Gelombang Anti-kolonial* dan berlangsung sekitar 40 tahun. Pada medio 1960-an muncul gelombang teror berikutnya, yaitu *Gelombang Kiri Baru*. Pada 1979 kemudian muncul *Gelombang Fundamentalisme Agama*, Roporport memprediksi gelombang ini akan selesai pada 2026.

Kendati demikian, Jeffrey D Simon (2013) menyimpulkan pemikiran Roporport bahwa kemunculan Gelombang Kelima gerakan teror dapat terjadi sebelum Gelombang Keempat tenggelam. Kuncinya adalah penguasaan teknologi, sehingga tidak membentuk karakteristik atau tipikal terorisme seperti gelombang-gelombang sebelumnya. Selain teknologi persenjataan dan militer, tak ayal senjata yang paling menakutkan adalah internet. Di mana 'senjata' ini mampu menembus batas kedaulatan sebuah negara dan menyebarkannya dengan cepat, serta proses rekrutmen massif (Simon, 2013). Harus diakui, internet dan media sosial mempermudah aktivitas terorisme.

### **Media Sosial sebagai Senjata Terorisme**

Tidak dapat dibayangkan bila tragedi Mumbai terjadi di tengah maraknya media sosial yang bermunculan dengan beragam fasilitas yang ditawarkan seperti sekarang ini. Peristiwa yang berlangsung 60-an jam itu makin suram masuk hingga ke ruang privat dengan beragam individu yang

menginterpretasikan peristiwa yang terjadi. Apa yang ditayangkan media, terlebih yang berkonvergensi, akan menjadi bahan kampanye kelompok teroris untuk mengamplifikasi aksi kekerasannya secara massif. Narasi, baik teks atau audio-visual, tentunya akan diproduksi sesuai kepetingan kelompok teroris dari materi media arus utama yang tersebar di internet. Materi tersebut akan diedit, dipotong, bahkan dikesampingkan sehingga hanya memunculkan sebagian saja dari informasi yang dipublikasikan demi kepentingan pembuat konten tersebut. Makna dari sebuah konten yang telah disunting sesuai dengan kepentingan pembuat konten menjadi kabur. Penggunaan media sosial dalam konflik telah mengubah karakter komunikasi dalam situasi krisis (Nissen, 2015).

Akhirnya publik perlahan mempercayai bahwa konten yang telah diproduksi ulang itu adalah konten informasi yang sebenar-benarnya. Masifnya sebaran informasi yang diproduksi ulang itu akan menenggelamkan informasi utuh yang dimiliki media arus utama, sehingga informasi media arus utama akan dikesampingkan karena banjirnya informasi-informasi yang sudah terdistorsi di berbagai *platform* media sosial.

Kekuatan media tradisional dan sosial media bisa dilihat terjadi pada medio 2012 antara Israel dan Hamas. Kedua belah pihak saling bersaing, secara digital, dengan memublikasikan gambar kesalahan pihak lain, men-*tweet* pesan secara teratur, dan dengan memposting video YouTube dalam upaya untuk menggambarkan konflik tersebut untuk keuntungan masing-masing pihak. Revolusi informasi karena itu mempercepat dan memperluas dimensi informasi dari konflik kontemporer sampai ke tingkat taktis, dan menghubungkan semua tingkatan dari strategis ke taktis dengan cara baru yang

selalu berubah. Untuk memasukkan pembuatan jaringan yang saling terkait (Nissen, 2015).

Sementara itu, ISIS telah menggunakan media sosial untuk menarik perhatian media massa dan audiens strategis, serta mengembangkan dan mengontrol pesannya untuk mendukung narasinya guna merekrut dan meradikalisasi pengikut, menghalangi lawan mereka, dan untuk mengumpulkan dana. Strategi ini antara lain menampilkan pemahaman tentang pentingnya memiliki satu visi (kekhalifahan) dan tujuan yang sama. Ini juga menunjukkan pemahaman tentang bagaimana memanfaatkan pengalaman pengguna dan media visual (infotainment) untuk mendapatkan perhatian dan melibatkan pengikut mereka dan audiens strategis lainnya secara emosional (Nissen, 2015).

## **KESIMPULAN**

Internet ibarat pedang bermata dua. Di satu sisi dia dapat melukai, namun di sisi lain dia memiliki manfaat. Begitu pula perkembangan pesat teknologi komunikasi dengan munculnya beragam *platform* media sosial. Di satu sisi kehadirannya membantu individu atau kelompok saling terhubung tanpa batasan geografis dan waktu, namun di sisi lain dapat menjadi senjata bagi kelompok tertentu dalam mencapai tujuannya, dalam konteks ini adalah teroris.

Jurnalisme di era banjir informasi seperti saat ini, dimana khalayak tidak lagi hanya sekedar konsumen tapi juga produsen (prosumen), sejatinya menjadi navigator untuk memandu publik dalam menyeleksi informasi yang terverifikasi. Dalam pemberitaan serangan teroris, peran jurnalisme diuji. Turut menebar informasi desas desus yang belum terbukti dan terverifikasi justru dapat mendegradasi media dan wartawan itu sendiri. Akhirnya publik lebih memilih

media sosial daripada media arus utama, bahkan pelan-pelan mengubur jurnalisme itu sendiri.

Di lain sisi, meski al-Qaeda dan ISIS perlahan tenggelam, namun kemunculan teknologi yang dimoderasi melalui internet itu akan terus memunculkan dua kelompok teror tersebut. Secara organisatoris ISIS boleh jadi mengalami pelemahan kekuatan pasca serangan AS di Irak-Suriah pada pertengahan 2017, tetapi ideologi ISIS belum akan berakhir bahkan mengalami globalisasi ISIS di beberapa negara melalui aksi *lone wolf* (Kirsten E. Schulze dan Joseph Chinyong Liow, 2018).

Filsuf Perancis Paul Virilio memandang kehadiran teknologi sebagai sesuatu kecemasan, karena menurutnya di dalam setiap inovasi teknologi selalu ditemukan kecelakaan atau yang dia sebut sebagai cacat spesifik dalam DNA-nya. Baginya, memahami sisi kecelakaan dari teknologi akan membawa umat manusia pada tingkat kewaspadaan yang tinggi dalam berteknologi. Paralel dengan pernyataan McLuhan dikutip Heru Nugroho (2020), bahwa media (dalam hal ini teknologi informasi) seperti pisau bermata dua; di satu sisi membawa manfaat kemanusiaan, tetapi di sisi lain justru bisa menghancurkan manusia itu sendiri. Penelitian Virilio mencatat, bahwa terdapat pergeseran perang nuklir ke perang informasi. Dia mengontekstualisasikan ulang perang global yang dilakukan dengan kecepatan cahaya melalui telekomunikasi, propaganda, dan kontrol sosial, yang kemungkinan ditambah dengan cara-cara tradisional, yaitu penggunaan senjata.

Meminjam pemikiran kaum Tekno-realis (Wilhelm, 2003), bahwa "teknologi tidak netral" dan "Internet adalah revolusioner tetapi tidak utopia", memiliki makna bahwa faham ini mengakui adanya berbagai macam kepentingan di balik penggunaan media, mungkin juga media yang bermula dari

mengontrol ruang dan waktu namun ironisnya berakhir dengan mengontrol orang. Meski demikian faham ini mengakui bahwa teknologi digital juga memiliki manfaat praktis yang kita dapat gunakan tanpa harus melawan nilai-nilai kemanusiaan.

Mengutip pernyataan Rupert Murdoch, bahwa, *jurnalisme yang hebat akan selalu menarik para pembacanya. Perkataan, gambar, dan grafis adalah perangkat jurnalisme yang harus secara cerdas dikemas; perangkat tersebut harus mengisi pikiran dan menggugah hati*

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputra, A. (2008). *Korban Kejahatan Terorisme: Ketika Negara Kurang Berperan*. Jakarta: pada Program Pascasarjana, Departemen Kriminologi FISIP UI.
- Altheide, D. L. (2007). The Mass Media and Terrorism. *Discourse & Communication*, 287-308.
- Dana M. Janbek and Philip M. Seib. (2010). *Global Terrorism and New Media: The Post-Al Qaeda Generation*. Abingdon, UK: Routledge.
- Giessmann, H. J. (2002). Media and the Public Sphere: Catalyst and Multiplier of Terrorism? . Vol. 20 No. 3 2002. *Media Asia Communication Quarterly*, 20.
- Jenkins, H. (2008). *Convergence Culture: Where Old and New Media Collide*. New York: NYU Press.
- Junaedi, F. (2010). Relasi Terorisme dan Media. *Jurnal Aspikom*, 15-25.
- Kirsten E. Schulze dan Joseph Chinyong Liow. (2018). *Making Jihadis, Waging Jihad: Transnational and Local Dimensions of The ISIS Phenomenon in Indonesia and Malaysia*. Asean Security.
- Laquer, W. (2003). *No End to War: Terrorism in the Twenty-First Century*. New York: Continuum.
- McNair, B. (1995). *An Introduction to Political Communication*. London: Routhledge.
- McNair, B. (2011). *An Introduction to Political Communication*. New York: Routledge.
- Mubarok. (2010). *Stigmatisasi Pembeitaan Terorisme di Media Massa*. Semarang: Tesis Program Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro.
- Nissen, T. E. (2015). *#TheWeaponizationOfSocialMedia: @Characteristics\_of\_Contemporary\_Conflicts*. Kopenhagen: Royal Danish Defense College.
- Pamala L. Griset; Sue Mahan. (2003). *Terrorism in Perspective*. SAGE Publication.
- Prajarto, N. (2004). Terorisme dan Media Massa: Debat Keterlibatan Media. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 37-52.
- Romli, K. (2016). *Komunikasi Massa*. Jakarta: Grasindo.
- Ross, J. I. (2007). Deconstructing the terrorism-news media. *Crime Media Culture*, 215-225.
- Schanzer, J. (2004, Oktober). *Al-Qaeda's Armies: Middle East Affiliate Groups and the Next Generation of Terror*. Retrieved November 12, 2020, from <https://www.washingtoninstitute.org/https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/al-qaedas-armies-middle-east-affiliate-groups-and-the-next-generation-of-te>
- Simon, J. D. (2013). *Lone Wolf Terrorism: Understanding The Growing Threat*. New York: Prometheus Book.
- Sukarno, A. W. (2011, Maret). Dilema Peliputan Terorisme dan Pergeseran Pola Framing Berita Terorisme di Media Massa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 14, 333-348. Retrieved Januari 2, 2021
- Suwarna, B. (2009, Agustus 08). *Terorisme dalam "Reality Show"*. Retrieved 1 7, 2021, from <https://edukasi.kompas.com/https://edukasi.kompas.com/read/2009/08/16/05132264/~Oase~Cakrawala?page=all>
- Tapsell, r. (2019). *Kuasa Media di Indonesia*. (W. P. Utomo, Trans.) Tangerang Selatan, Banten: Marjin Kiri.
- Udupa, S. (2009). *Mediatized Terror: Terror in the Age of Media Explosion*. New Delhi: Economic and Political Weekly.

Wening Udasmoro (editor). (2020). *Gerak Kuasa; Politik Wacana, Identitas, dan Ruang/Waktu dalam Bingkai Kajian Budaya dan Media*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

Wilhelm, A. G. (2003). *Demokrasi di Era Digital: Tantangan Kehidupan Politik di Ruang Cyber*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

**Dokumen Online**

Remotivi. (2016, 1 14). *Jurnalisme Teror, Teror Jurnalisme*. Retrieved 1 7, 2021, from <https://www.remotivi.or.id/>:  
<https://www.remotivi.or.id/meja-redaksi/249/Jurnalisme-Teror,-Teror-Jurnalisme>

Sarundajang, S. (2017, Juli). *Media Berita dan Kontra-Terrorisme*. Retrieved from <https://dewanpers.or.id/>:  
[https://dewanpers.or.id/publikasi/opini\\_detail/141/Media\\_Berita\\_dan\\_Kontra-Terrorisme](https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/141/Media_Berita_dan_Kontra-Terrorisme)